

Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya

Rinto Alexandro

Universitas Palangka Raya, Indonesia

ABSTRACT

Keywords:

Contribution;
Retribution;
PAD;

Abstract: Palangka Raya City Government is able to explore, manage, and maximize the potential of existing resources in order to increase revenue from the Regional Original Revenue in Palangkaraya City. This research is quantitative in nature and the research sample is the reception of regional levies from 2013 to 2018. Based on the results of managing data, the contribution of regional levies to the original income of the City of Palangkaraya is fluctuating, because the revenue from the area of regional levies experiences ups and downs in the income received, where the highest income was obtained in 2013 at 17.04% of the total Regional Original Revenue, and the lowest was obtained in 2018 at 11%.

Kata kunci:

Kontribusi;
Retribusi;
PAD;

Abstrak: Pemerintah Kota Palangka Raya mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji seberapa besar Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya 2013-2018. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan sampel penelitian adalah penerimaan Retribusi Daerah sejak tahun 2013 hingga 2018. Berdasarkan hasil mengelola data, Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya bersifat fluktuatif, karena pendapatan dari bidang Retribusi Daerah mengalami naik-turunnya pendapatan yang diterima, dimana pendapatan tertinggi di peroleh pada tahun 2013 sebesar 17,04% dari total Pendapatan Asli Daerah, dan yang terendah diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar 11%.

Alamat Korespondensi:

E-mail: alexandro@gmail.com (Alexandro)

Pendahuluan

Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Demi kelangsungan kemajuan Kota Palangka Raya maka diharapkan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada guna meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kota Palangka Raya. Salah satu penerimaan daerah terbesar yang berasal dari wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang harus dikelola dan diatur dengan sebaik-baiknya, karena salah satu hal terpenting agar pembangunan suatu daerah dapat menjadi daerah yang maju adalah bergantung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itulah yang menyebabkan mengapa potensi dan sumber daya daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah perlu untuk ditingkatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya agar kemandirian daerah dapat terwujud. Sedangkan

kemampuan keuangan daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap anggaran pendapatan daerah. Kota Palangka Raya adalah salah satu dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah. Banyak potensi daerah yang bisa digali dari Kota Palangka Raya dan potensi yang ada dapat menghasilkan pemasukan yang cukup pada PAD Kota Palangka Raya, maka pihak pemerintah daerah Kota Palangka Raya melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) berupaya untuk meningkatkan PAD Kota Palangka Raya dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari potensi daerah yang ada. Adapun total retribusi tahun 2013 sebesar Rp. 10.831.917.077 dan penerimaan daerah terhadap pendapatan asli daerah sebesar Rp. 63.556.113.906. Tahun 2014 total retribusi sebesar Rp. 13.929.492.466 dan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 90.698.979.522. Tahun 2015 total retribusi sebesar Rp. 14.211.249.380 dan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 90.034.887.052. Tahun 2016 total retribusi sebesar Rp. 15.472.826.669 dan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 121.700.475.927. Tahun 2017 total retribusi sebesar Rp. 12.737.916.296 dan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 110.182.970.370. Tahun 2018 total retribusi sebesar Rp. 12, 115.043.404 dan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 109.968.783.870.

Pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Erlina, 2016; Muhammad, 2006). Upaya peningkatan pendapatan daerah oleh setiap pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota haruslah dilakukan dengan berbagai kebijaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing (Liana, 2017; Rajali, 2011). Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah sendiri adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan (Nasir, 2019; Soamole, 2013; Sudarmana & Sudiarta, 2020). Retribusi daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Tresnawati & Putri, 2017). Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran tetapi tersebut perlu dilakukan perbaikan bahwa retribusi tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan paksaan secara yudiris berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Kaho, 2005; Siahaan, 2010). Kontribusi Retribusi daerah sangat membantu kesiapan sebuah daerah untuk melakukan otonomi daerahnya (Martini et al., 2019). Pernyataan ini didukung oleh beberapa penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Budhi, 2018) menunjukkan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dan Hasil Pengujian pengaruh tidak langsung yang dilakukan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja tidak mampu memediasi variabel pajak daerah dan retribusi daerah pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Andri, (2017) menunjukkan efektivitas, kontribusi dan potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Utara periode anggaran tahun 2011 sampai 2015. Perusahaan perlu meningkatkan profesionalitas pekerjaan dan juga meningkatkan efektivitas, kontribusi dan potensi pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut maka, Tujuan penelitian ini, untuk mengkaji seberapa besar Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya 2013-2018.

Metode Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2010) metode penelitian kuantitatif adalah merupakan data yang diperoleh dari perusahaan atau badan secara langsung yang berbentuk angka atau bilangan. Tempat di lakukannya penelitian ini adalah di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya yang terletak di jalan Yos.Sudarso No.02 Palangka Raya. Populasi data yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh jenis pendapatan Retribusi Daerah Di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Palangka Raya. Sedangkan sampel menurut (Arikunto, 2006) "sampel didefinisikan sebagai pemilihan sejumlah subjek penelitian sebagai wakil dari populasi yang diteliti". Sehingga sampel dari penelitian ini adalah penerimaan Retribusi Daerah sejak tahun 2013 hingga 2018, peneliti mengambil tahun tersebut karena berhubungan dengan data terbaru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis data yang digunakan: Kontribusi yaitu analisis rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Sumber: Halim (2001:155)

Hasil dan Pembahasan

Tujuan penelitian ini, untuk mengkaji seberapa besar Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya 2013-2018. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan maka diperoleh Kontribusi Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang ditunjukkan pada tabel 1, 2, 3, dan 4 berikut.

Tabel 1. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2018

No	Tahun	Jenis Reribusi	Total Pendapatan (Rp)	Presentase (%)
1	2013	Retribusi Daerah	10.831.917.077	17,04
2	2014	Retribusi Daerah	13.929.492.466	15,35
3	2015	Retribusi Daerah	14.211.249.380	15,71
4	2016	Retribusi Daerah	15.472.826.669	12,71
5	2017	Retribusi Daerah	12.737.916.296	11,56
6	2018	Retribusi Daerah	12.115.043.404	11,00

Sumber Data: Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Berdasarkan tabel 1, maka kita dapat melihat besaran persentase setiap tahun dari Retribusi Daerah, Retribusi Daerah paling tinggi diterima pada tahun 2013 yaitu sebesar 17,04% dari total Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2014 Kontribusi Retribusi daerah mengalami penurunan menjadi 15,35% dari total Pendapatan Asli Daerah. Tahun 2015, kontribusi Retribusi Daerah mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,43%, sehingga total kontribusi Retribusi Daerahnya menjadi 15,78%. Sejak tahun 2015, Kontribusi Retribusi Daerah mengalami penurunan pada tahun 2016, 2017, dan 2018 berturut-turut yaitu sebesar 12,71%, 11,56%, dan 11%.

Tabel 2. Retribusi Jasa Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 Hingga 2018

No	Tahun	Jenis Retribusi	Total Pendapatan Retribusi (Rp)	Persentase (%)
1.	2013	Retribusi Jasa Umum	6.181.727.799	9,72
2.	2014	Retribusi Jasa Umum	7.507.445.085	8,27
3.	2015	Retribusi Jasa Umum	6.015.611.977	6,68
4.	2016	Retribusi Jasa Umum	5.859.064.730	4,81
5.	2017	Retribusi Jasa Umum	5.650.905.964	5,12
6.	2018	Retribusi Jasa Umum	6.013.633.670	5,46

Sumber Data: Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Berdasarkan Tabel di 2, maka kita dapat melihat besaran persentase setiap tahun dari Retribusi Jasa Umum. Kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya tahun 2013 adalah sebesar 9,72% dari total Pendapatan Asli Daerah, sekaligus menjadi penyumbang terbesar dari jenis Retribusi Daerah. Pada tahun 2014 Kontribusi Retribusi Jasa Umum mengalami penurunan menjadi 8,27%. Penurunan kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah terus terjadi hingga pada tahun 2015 dan 2016, di mana pada tahun 2015 kontribusi Retribusi Jasa Umum sebesar 6,68% dan 2016 sebesar 4,81%. Akan tetapi, pada tahun 2017 kontribusi Retribusi Jasa Umum terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami sedikit peningkatan, yaitu menjadi 5,12% dari total Pendapatan Asli Daerah. Begitu juga dengan tahun 2018, Kontribusi Jasa Umum mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,34%, sehingga total kontribusi Retribusi Jasa Umum pada tahun 2018 adalah sebesar 5,46.

Tabel 3. Retribusi Jasa Usaha Tahun 2013-2018

No	Tahun	Jenis Retribusi	Total Pendapatan Retribusi (Rp)	Persentase (%)
1.	2013	Retribusi jasa Usaha	6.181.727.799	3,08
2.	2014	Retribusi jasa Usaha	7.507.445.085	3,24
3.	2015	Retribusi jasa Usaha	6.015.611.977	3,22
4.	2016	Retribusi jasa Usaha	5.859.064.730	3,11
5.	2017	Retribusi jasa Usaha	5.650.905.964	2,43
6.	2018	Retribusi jasa Usaha	6.013.633.670	2,45

Sumber Data: Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Dari Tabel 3, berikut ini adalah grafik kontribusi ketribusi jasa usaha terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya tahun 2013 adalah sebesar 3,08% dari total Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2014 Kontribusi Retribusi Jasa Usaha mengalami sedikit peningkatan, yaitu menjadi 3,24% dari total Pendapatan Asli Daerah, akan tetapi pada tahun 2015, kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, sehingga pada tahun 2015 besarnya kontribusi Retribusi Jasa Usaha sebesar 3,22%. Bahkan pada tahun 2016 hingga 2017 kontribusi dari retribusi ini terus mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 3,11% dan pada tahun 2017 kontribusinya sebesar 2,43%. Akan tetapi pada tahun 2018 kontribusi Retribusi Jasa Usaha terhadap Pendapatan Asli Daerah bertambah 0,02% dari tahun sebelumnya, sehingga total kontribusi Jasa Usaha pada tahun 2018 adalah sebesar 2,45%.

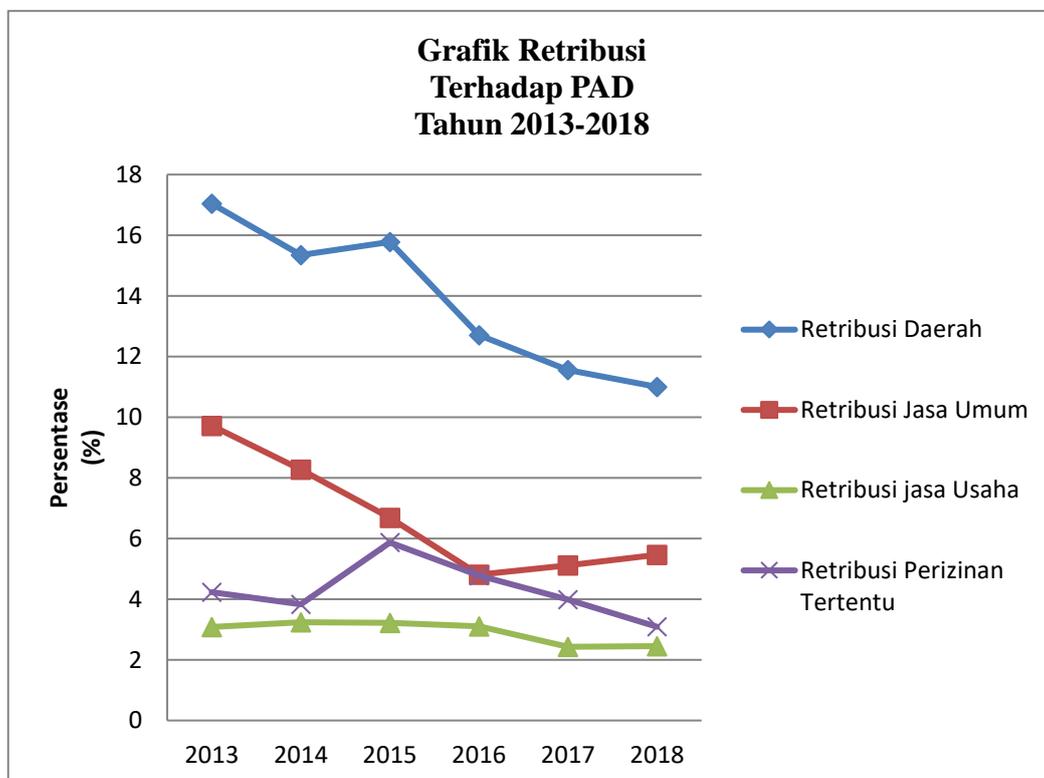
Tabel 4. Retribusi Perizinan Tertentu Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013 Hingga 2018

No	Tahun	Jenis Retribusi	Total Pendapatan Retribusi (Rp)	Persentase (%)
1	2013	Retribusi Perizinan Tertentu	2.689.611.698	4,23
2	2014	Retribusi Perizinan Tertentu	3.480.346.030	3,83
3	2015	Retribusi Perizinan Tertentu	5.289.883.273	5,87
4	2016	Retribusi Perizinan Tertentu	5.820.231.491	4,78
5	2017	Retribusi Perizinan Tertentu	4.398.604.841	3,99
6	2018	Retribusi Perizinan Tertentu	3.404.786.669	3,09

Sumber Data: Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya

Dari Tabel di atas, berikut ini adalah grafik kontribusi retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palangka Raya sejak tahun 2013-2018, kontribusi terbesar dari retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah terjadi pada tahun 2015, dimana kontribusinya sebesar 5,87% dari total pendapatan asli daerah. Kontribusi dari retribusi perizinan tertentu ini terbilang fluktuatif, diaman pada tahun 2013 kontribusinya sebesar 4,23%, kemudian terjadi penurunan kontribusi pada tahun 2014 menjadi 3,39%. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang terbilang signifikan pada kontribusi retribusi perizinan tertentu menjadi 5,87%. Akan tetapi, sejak 2015 hingga 2018 terjadi penurunan kontribusi dari retribusi perizinan tertentu dimana pada tahun 2016 kontribusinya 4,785, tahun 2017 kontribusinya 3,99%, bahkan pada tahun 2018 terjadi penurunan kontribusi retribusi perizinan Tertentu sekaligus menjadi kontribusi yang terendah sejak 2013 hingga 2018, dimana kontribusinya hanya sebesar 3,10% dari total pendapatan asli daerah (PAD).

Berdasarkan Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4, maka berikut ini adalah Grafik dari retribusi daerah (retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu) terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Secara lebih rinci ditunjukkan pada gambar garafif 1 berikut

**Gambar 1.** Grafik Retribusi Terhadap PAD Tahun 2013-2018

Dari Gambar di atas, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah yang paling tinggi disumbangkan dari retribusi jasa umum, kemudian retribusi perizinan tertentu serta yang terakhir dari retribusi jasa usaha. Setiap jenis retribusi daerah sejak tahun 2013 hingga 2018 mengalami kontribusi yang cenderung menurun, dimana kontribusi tidak konsisten meningkat dari tahun ke tahun akan tetapi cenderung mengalami penurunan.

Seperti yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah penelitian ini yaitu ingin mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palangka Raya. Retribusi daerah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Tresnawati & Putri, 2017). Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, tidak dikenakan iuran tetapi tersebut perlu dilakukan perbaikan bahwa retribusi tidak hanya bersifat ekonomis, melainkan paksaan secara yudis berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung (Kaho, 2005; Siahaan, 2010). Kontribusi Retribusi daerah sangat membantu kesiapan sebuah daerah untuk melakukan otonomi daerahnya (Martini et al., 2019). Masyarakat Kota Palangka Raya harus membayar retribusi daerah kepada Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan besaran tarif yang sudah di tentukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya. Penetapan prinsip dan sasaran Retribusi Daerah berdasarkan dengan mempertimbangkan biaya, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan (Siahaan, 2010). Prinsip dan sasaran penetapan retribusi daerah Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil mengelola data, kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Palangka Raya bersifat fluktuatif, karena pendapatan dari bidang retribusi daerah mengalami naik-turunya pendapatan yang diterima, dimana pendapatan tertinggi di peroleh pada tahun 2013 sebesar 17,04% dari total pendapatan asli daerah, dan yang terendah diperoleh pada tahun 2018 yaitu sebesar 11%. Dari jenis-jenis retribusi daerah, retribusi jasa umum adalah jenis retribusi penyumbang kontribusi terbesar terhadap pendapatan asli daerah, dimana pada tahun 2013 kontribusi retribusi jasa umum terhadap pendapatan asli daerah adalah sebesar 9,72% sekaligus menjadi yang tertinggi, sedangkan yang terendah diterima pada tahun 2016 yaitu sebesar 4,81%. Sedangkan kontribusi dari jenis-jenis retribusi daerah terhadap retribusi daerah yang tertinggi di peroleh dari retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa usaha. Dari setiap tahunnya retribusi jasa umum selalu menyumbang pendapatan terbesar dan Retribusi Jasa Usaha penyumbang pendapatan terkecil. Total kontribusi retribusi jasa umum terhadap retribusi daerah terbesar di terima pada tahun 2013 yaitu sebesar 57,06%, sedangkan terkecil diterima pada tahun 2016 sebesar 37,86% dari total retribusi daerah.

Hasil penelitian yang senada dengan hasil penelitian ini adalah Penelitian Prasetyo, (2008) penelitian ini berkaitan dengan penelitian penulis, terdapat persamaan dalam cara mengitung kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, penulis menemukan relevannya hasil yang di teliti, karena dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bersifat fluktuatif. Penelitian yang dilakukan oleh (Budhi, 2018) menunjukkan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dan Hasil Pengujian pengaruh tidak langsung yang dilakukan antara pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tenaga kerja tidak mampu memediasi variabel pajak daerah dan retribusi daerah pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Andri, (2017) menunjukkan efektivitas, kontribusi dan potensi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa Utara periode anggaran tahun 2011 sampai 2015. Perusahaan perlu meningkatkan profesionalitas pekerjaan dan juga meningkatkan evektivitas, kontribusi dan

potensi pajak hotel untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal tersebut maka, Tujuan penelitian ini, untuk mengkaji seberapa besar Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya 2013-2018.

Simpulan

Retribusi Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya bersifat *fluktuatif*, salah satu penyebabnya dikarenakan berbagai jenis retribusi yang sebelumnya dipungut oleh Pemerintah Kota Palangka Raya menjadi tidak dipungut lagi, hal ini karena berkaitan dengan perubahan peraturan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya melalui Retribusi Daerah, hendaknya pemerintah menyusun target dengan berbasis data historis dan prospek kegiatan ekonomi yang ada

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Budhi, J. K. D. dan M. K. S. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(6), 1695–1722. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EEB.2018.v07.i06.p08>
- Erlina. (2016). *Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota*. FEBI Universitas Islam Negeri.
- Kaho, J. R. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Liana, N. (2017). Optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah dihubungkan pariwisata kota bogor dan kabupaten bogor. *Jurnal Living Law ISSN*, 9(1). <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/download/1373/1332>
- Martini, R., Septian Bagus Pambudi, M., & Mubarak, H. (2019). Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan*, 2(1), 90–95. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/1489/1187>
- Muhammad, F. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah*. UII Pres.
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekade Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Pongtuluran Andri Christian, J. J. S. dan N. B. (2017). Evaluasi Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18617.2017>
- Prasetyo, H. P. (2008). *Analisis Penerimaan Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta*. Universitas Satana Darma.
- Rajali. (2011). STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Aceh Tenggara) Negara Republik Indonesia sebagai negara Undang Dasar 1945 , antara lain. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 3(2), 234–286. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/download/1373/1332>
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada.

- Soamole, M. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Suatu Studi Di Kabu. Kepulauan Sula). *Governance*, 5(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/1489/1187>
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiarta, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cetakan Ke). Alfabeta.
- Tresnawati, R., & Putri, E. A. (2017). Tinjauan Atas Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(2), 73. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i2.9228>